



Analisis Ekonomi Politik Krisis Minyak Goreng: Dampak Sosial dan Kebijakan Publik

Annisa Rakhma Dewi¹, Inggis Shalama Zahira², Nanda Tiara Dewi³, Putri Vika
Nurwinda⁴, Dian Merza Zaxhela⁵, Hotman⁶

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: annisarede0@gmail.com

Diterima: 19-06-2025 | Disetujui: 20-06-2025 | Diterbitkan: 23-06-2025

ABSTRACT

The cooking oil crisis in Indonesia is a multidimensional phenomenon influenced by the dynamics of the global economy, the structure of the domestic market, and government public policy. From a political economy perspective, the crisis was triggered by the rising price of crude palm oil (CPO) on the international market, which had a direct impact on the rising price and scarcity of cooking oil in the country. The cooking oil crisis that hit Indonesia in 2021 to 2022 is a clear example of how political economy dynamics can affect social stability and the effectiveness of public policies. This research aims to analyse the cooking oil crisis from a political economy perspective by highlighting the roles of state, corporate and community actors in the production, distribution and policy-making processes. A qualitative method was used with a literature study and policy analysis approach. The results showed that the crisis was not solely caused by supply shortages, but rather by governance failures and the dominance of oligarchic interests in the strategic commodity sector. The social impacts include increased economic burden on poor households, inequality of access, and decreased public trust in the government. On the other hand, the public policies implemented are reactive and lack transparency, such as export bans and setting the highest retail price, which exacerbate market distortions. This study recommends policy reforms based on social justice and transparency in the governance of strategic food commodities as a long-term mitigative measure.

Keywords: Political Economy, Cooking Oil Crisis, Social Impact, Public Policy

ABSTRAK

Krisis minyak goreng di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, struktur pasar domestik, serta kebijakan publik yang diambil pemerintah. Dari perspektif ekonomi politik, krisis ini dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional, yang berdampak langsung pada kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Krisis minyak goreng yang melanda Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana dinamika ekonomi politik dapat memengaruhi kestabilan sosial dan efektivitas kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis minyak goreng dari perspektif ekonomi politik dengan menyoroti peran aktor negara, korporasi, dan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan pengambilan kebijakan. Metode kualitatif digunakan dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini tidak semata disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan oleh kegagalan tata kelola dan dominasi kepentingan oligarki

dalam sektor komoditas strategis. Dampak sosial yang ditimbulkan meliputi meningkatnya beban ekonomi rumah tangga miskin, ketimpangan akses, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, kebijakan publik yang diterapkan bersifat reaktif dan kurang transparan, seperti larangan ekspor dan penetapan harga eceran tertinggi, yang justru memperparah distorsi pasar. Studi ini merekomendasikan reformasi kebijakan berbasis keadilan sosial dan transparansi dalam tata kelola komoditas pangan strategis sebagai langkah mitigatif jangka panjang.

Katakunci: Ekonomi Politik, Krisis Minyak Goreng, Dampak Sosial, Kebijakan Publik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Annisa Rakhma Dewi, Inggis Shalama Zahira, Nanda Tiara Dewi, Putri Vika Nurwinda, Dian Merza Zaxhela, & Hotman. (2025). Analisis Ekonomi Politik Krisis Minyak Goreng: Dampak Sosial dan Kebijakan Publik. *Indonesia Economic Journal*, 1(1), 206-219. <https://doi.org/10.63822/f4brf717>

PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang digunakan oleh berbagai lapisan sosial, baik kalangan bawah, menengah, maupun atas. Penggunaan minyak goreng tidak memandang status sosial karena merupakan sarana utama dalam proses memasak, khususnya untuk menggoreng makanan. Masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai makanan yang digoreng dibandingkan dengan makanan yang direbus, karena makanan yang digoreng biasanya memiliki cita rasa yang renyah, gurih, dan tampilan yang lebih menarik. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan terhadap minyak goreng di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaannya. Namun, pada masa krisis, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akibat kenaikan harga bahan baku minyak goreng yang signifikan. Ironisnya, hal ini terjadi meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Krisis ini diperparah oleh kecenderungan produsen untuk mengekspor minyak goreng ke luar negeri demi meraih keuntungan lebih besar, sehingga pasokan untuk kebutuhan dalam negeri menjadi terbatas bahkan mengalami kelangkaan. (Wardhani & Rahmahani, 2023)

Krisis minyak goreng yang melanda Indonesia pada periode 2021–2022 merupakan salah satu fenomena ekonomi-politik paling kompleks, dengan dampak yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat (PPBK DPR RI, 2022). Sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, paradoks kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi-politik nasional (FISIP UI, 2022). Krisis ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sarat dengan aspek politik, terutama terkait distribusi kekuasaan, benturan kepentingan antarpemangku kepentingan, serta efektivitas kebijakan public (FISIP UI, 2022). Kenaikan harga minyak goreng dari sekitar Rp11.000 per liter menjadi lebih dari Rp20.000 per liter pada puncak krisis mencerminkan kegagalan mekanisme pasar dalam menjamin ketersediaan komoditas strategis bagi masyarakat. Kelangkaan minyak goreng di pasar domestik terjadi seiring meningkatnya ekspor minyak kelapa sawit (CPO), dipicu oleh lonjakan harga komoditas global dan permintaan internasional yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kepentingan peningkatan devisa negara melalui ekspor dan kebutuhan pemenuhan pangan pokok bagi masyarakat dalam negeri.

Dari perspektif ekonomi-politik, krisis minyak goreng mengungkap adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara kepentingan korporasi besar kelapa sawit dan kebutuhan rakyat terhadap akses pangan pokok yang terjangkau. Struktur industri kelapa sawit yang terkonsentrasi pada segelintir perusahaan besar menciptakan kondisi oligopoli, di mana produsen memiliki kekuatan pasar yang signifikan untuk menentukan alokasi produksi antara pasar domestik dan pasar ekspor. Dalam situasi ini, konsumen domestik terutama kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terhadap gejolak harga dan kelangkaan pasokan (Maolis, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dinamika ekonomi-politik yang melatarbelakangi krisis minyak goreng, mengevaluasi efektivitas kebijakan publik yang diterapkan pemerintah, serta mengidentifikasi dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik, penelitian ini berupaya mengungkap interaksi kompleks antara kekuatan pasar, otoritas politik, dan kepentingan sosial dalam konteks krisis minyak goreng di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis-interpretatif untuk memahami kompleksitas fenomena krisis minyak goreng dari perspektif ekonomi politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika interaksi antara struktur ekonomi, kekuasaan politik, dan dampak sosial yang sulit diukur secara kuantitatif. Paradigma konstruktivis-interpretatif memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap bagaimana berbagai aktor membangun makna dan interpretasi atas krisis minyak goreng serta respons kebijakan yang diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Ekonomi Politik dalam Krisis Minyak Goreng

Krisis minyak goreng yang melanda Indonesia pada 2021–2022 dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui perspektif teori oligarki sebagaimana dikemukakan oleh Jeffrey A. Winters. Menurut Winters, oligarki merupakan suatu bentuk sistem politik di mana kekuasaan tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok yang memiliki kekayaan material dalam jumlah sangat besar (Winters, 2022). Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, meskipun secara formal menganut sistem demokrasi, praktik kekuasaan menunjukkan kecenderungan oligarkis, di mana aktor-aktor ekonomi dengan kekuatan finansial yang besar memainkan peran dominan dalam pengambilan kebijakan publik. Reorganisasi struktur kekuasaan pasca-Soeharto memperlihatkan bagaimana elite ekonomi mampu membentuk dan memanfaatkan institusi politik demi melindungi serta memperluas kepentingan bisnis mereka (Hadiz, 2013). Dalam hal ini, industri kelapa sawit menjadi contoh konkret dominasi oligarki dalam ekonomi-politik Indonesia. Segelintir perusahaan besar menguasai sebagian besar lahan, proses produksi, serta distribusi produk turunan sawit, termasuk minyak goreng. Mereka tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga memiliki jejaring kekuasaan yang kuat di tingkat legislatif, eksekutif, dan birokrasi. Dengan kekuatan tersebut, mereka mampu memengaruhi bahkan mengarahkan kebijakan pemerintah, seperti pemberian relaksasi ekspor, penetapan harga eceran tertinggi, hingga lemahnya pengawasan terhadap kewajiban distribusi domestik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik tidak sepenuhnya dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih mencerminkan kepentingan akumulasi modal segelintir elite ekonomi. Oleh karena itu, krisis minyak goreng tidak semata-mata merupakan persoalan pasokan atau teknis distribusi, tetapi juga cerminan dari struktur kekuasaan yang timpang, di mana oligarki ekonomi mampu mengendalikan negara demi keuntungan mereka sendiri, meskipun hal tersebut merugikan kepentingan publik.

Struktur Oligopoli dan Konsentrasi Kekuatan Pasar

Krisis minyak goreng yang terjadi pada 2021–2022 secara nyata mengungkap struktur pasar yang oligopolistik dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Dalam struktur ini, sebagian besar produksi dan distribusi kelapa sawit dikuasai oleh segelintir perusahaan besar yang memiliki pengaruh dominan terhadap arah dan dinamika pasar. Kondisi tersebut menciptakan konfigurasi pasar oligopoli, di mana kekuatan pasar tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada aktor-aktor ekonomi tertentu yang memiliki kapasitas besar dalam menentukan strategi produksi, distribusi, hingga penetapan harga. Secara ekonomi, pasar yang bersifat oligopolistik cenderung menurunkan tingkat persaingan, khususnya dalam aspek harga. Dalam pasar yang kompetitif, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran secara terbuka.

Namun, dalam struktur pasar oligopoli, harga dapat dikendalikan oleh pelaku-pelaku dominan melalui koordinasi formal maupun informal, yang pada akhirnya berpotensi merugikan konsumen. Dalam konteks industri kelapa sawit, kecenderungan ini terlihat dari kemampuan perusahaan-perusahaan besar dalam mengarahkan alokasi produksi crude palm oil (CPO), dengan memprioritaskan pasar ekspor yang menawarkan margin keuntungan lebih tinggi dibandingkan pasar domestik.

Keputusan korporasi untuk mengutamakan ekspor crude palm oil (CPO) menyebabkan berkurangnya pasokan bahan baku untuk produksi minyak goreng dalam negeri, yang pada akhirnya memicu kelangkaan dan lonjakan harga di pasar domestik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepentingan akumulasi keuntungan perusahaan lebih diutamakan dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Lemahnya regulasi pemerintah serta ketiadaan kewajiban yang tegas dalam mengalokasikan sebagian produksi untuk konsumsi nasional turut memperparah ketimpangan ini. Akibatnya, krisis minyak goreng tidak hanya mencerminkan persoalan distribusi semata, melainkan juga mengindikasikan adanya masalah struktural dalam tata kelola industri strategis nasional yang terlalu memberikan ruang bagi dominasi oligopoli tanpa kontrol yang memadai demi perlindungan kepentingan publik.

Relasi Kapital yang Dominan

Oligarki di Indonesia mencerminkan struktur kekuasaan ekonomi-politik yang ditopang oleh dominasi relasi kapital, di mana arah kebijakan dan praktik industri lebih berorientasi pada akumulasi modal daripada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Dalam konteks ini, kepentingan ekonomi segelintir elite pemilik modal sering kali memperoleh prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan strategis, bahkan ketika kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Fenomena ini tampak jelas dalam industri kelapa sawit, di mana orientasi produksi lebih diarahkan untuk memenuhi permintaan pasar global ketimbang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng di dalam negeri.

Dorongan kuat terhadap ekspor crude palm oil (CPO) dipicu oleh fluktuasi harga komoditas global yang kerap menjanjikan keuntungan besar. Ketika harga CPO di pasar internasional meningkat tajam, perusahaan-perusahaan besar cenderung memprioritaskan penyaluran produksinya ke luar negeri guna meraih profit maksimal, ketimbang memenuhi kebutuhan distribusi domestik. Orientasi ini pada akhirnya menciptakan krisis ketersediaan bahan baku untuk minyak goreng di dalam negeri, yang berdampak pada kelangkaan dan lonjakan harga di pasar domestik, serta membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.

Masalah ini semakin diperparah oleh struktur kepemilikan industri kelapa sawit yang sangat terkonsentrasi. Sejumlah kecil konglomerat besar menguasai sebagian besar lahan perkebunan, fasilitas pengolahan, hingga jaringan distribusi, sehingga memiliki kapasitas untuk secara efektif mengendalikan pasar. Konsentrasi kekuasaan ini membuka ruang bagi terjadinya koordinasi, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam penetapan harga dan pengaturan alokasi produksi. Dalam kondisi semacam ini, muncul ketimpangan relasi kekuasaan yang mencolok—di satu sisi, produsen memiliki kekuatan pasar yang besar (market power), sementara di sisi lain, konsumen domestik berada dalam posisi lemah sebagai *price taker* yang hanya dapat menerima harga yang ditentukan tanpa memiliki daya tawar. Relasi kuasa yang asimetris ini mencerminkan bagaimana dominasi oligarki dalam struktur ekonomi dapat menghasilkan distorsi serius dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Negara, yang seharusnya hadir sebagai penyeimbang antara kepentingan kapital dan rakyat, justru kerap gagal menjalankan fungsi protektifnya akibat keterikatan

struktural antara penguasa politik dan pemilik modal. Alhasil, kebijakan publik yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan akumulasi kapital ketimbang mendorong keadilan dalam distribusi ekonomi. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini tidak hanya memperbesar kerentanan ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.

Mekanisme Pertahanan Kekayaan Oligarki

Esensi dari oligarki, sebagaimana dikemukakan oleh Jeffrey A. Winters (2022), terletak pada upaya mempertahankan dan melindungi kekayaan yang ekstrem. Oligarki tidak semata-mata tentang kepemilikan modal dalam jumlah besar, tetapi juga tentang bagaimana kekayaan tersebut dipertahankan melalui pengaruh terhadap struktur politik dan kebijakan negara. Dalam konteks krisis minyak goreng di Indonesia, strategi pertahanan kekayaan ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui mekanisme-mekanisme kekuasaan yang halus namun efektif. Tiga mekanisme utama yang menonjol dalam kasus ini adalah *regulatory capture*, mobilitas kapital, dan fragmentasi kebijakan, yang secara bersama-sama membentuk ekosistem yang mendukung dominasi oligarki dalam sektor kelapa sawit.

Capture Regulasi (Regulatory Capture)

Regulatory capture terjadi ketika aktor-aktor bisnis, khususnya mereka yang memiliki pengaruh ekonomi besar, mampu "menangkap" lembaga-lembaga pembuat kebijakan publik untuk melayani kepentingan mereka. Dalam industri kelapa sawit, aktor-aktor oligarkis memanfaatkan kekuatan ekonomi dan kedekatan politik untuk memengaruhi proses legislasi dan regulasi. Sebelum krisis minyak goreng pecah, regulasi yang mewajibkan produsen untuk mengalokasikan sebagian produksi CPO (Crude Palm Oil) ke pasar domestik sangat lemah atau bahkan nyaris tidak ada. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses jangka panjang di mana kepentingan bisnis besar berhasil menegosiasikan kebijakan yang memprioritaskan ekspor demi keuntungan maksimal. Dalam situasi seperti ini, negara tidak lagi menjadi pelindung kepentingan rakyat, tetapi justru menjadi instrumen yang memperkuat posisi oligarki melalui kebijakan yang permisif terhadap akumulasi modal.

Mobilitas Kapital

Salah satu kekuatan utama oligarki adalah kemampuannya untuk memindahkan modal secara fleksibel sesuai dengan perubahan pasar global. Dalam kasus minyak goreng, produsen besar yang menguasai industri kelapa sawit memilih menyalurkan produksi ke pasar internasional ketika harga CPO meningkat tajam, meninggalkan pasar domestik dalam kondisi kekurangan pasokan. Kemampuan untuk bermanuver lintas batas ini menciptakan posisi tawar (*leverage*) yang kuat terhadap pemerintah. Ketika krisis terjadi dan masyarakat menuntut intervensi, para pelaku industri justru menggunakan ancaman kelangkaan sebagai alat negosiasi. Dengan kata lain, mobilitas kapital tidak hanya soal efisiensi bisnis, tetapi juga merupakan instrumen politik untuk memaksa negara menyusun kebijakan yang lebih ramah terhadap kepentingan korporasi. Pemerintah pun berada dalam posisi dilema: jika tidak mengakomodasi kepentingan produsen, pasokan dalam negeri terancam; namun jika terlalu mengakomodasi, harga dan aksesibilitas bagi masyarakat luas menjadi korban.

Fragmentasi Kebijakan

Oligarki juga cerdas dalam mengeksploitasi kelemahan struktural negara, salah satunya adalah fragmentasi institusional. Dalam birokrasi Indonesia, kebijakan yang terkait dengan sektor strategis seperti

kelapa sawit melibatkan banyak Lembaga Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Koordinasi antar lembaga yang lemah dan tumpang tindihnya kewenangan menciptakan ruang yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor oligarkis untuk menghindari tanggung jawab dan mengaburkan akuntabilitas. Fragmentasi ini mengakibatkan kebijakan menjadi inkonsisten dan mudah dilobi. Misalnya, saat pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor atau Domestic Market Obligation (DMO), pelaksanaannya sering kali tidak efektif karena lemahnya pengawasan serta tarik-menarik kepentingan antar lembaga. Dalam situasi ini, oligarki tidak perlu melawan kebijakan secara frontal, mereka cukup memainkan celah-celah koordinasi antar institusi untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka.

Paradoks Negara Produsen Terbesar

Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia menghadapi ironi besar ketika terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar domestik pada 2021-2022. Paradoks ini tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam distribusi atau manajemen logistik, melainkan merupakan cerminan mendalam dari apa yang oleh Jeffrey A. Winters disebut sebagai “*resource curse*” dalam kerangka oligarki. *Resource curse*, atau kutukan sumber daya, dalam konteks ini tidak terjadi karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kekayaan alam justru dikuasai dan dimonopoli oleh segelintir elite ekonomi. Alhasil, potensi besar yang dimiliki oleh industri kelapa sawit tidak berkontribusi secara optimal terhadap kesejahteraan masyarakat luas, melainkan lebih banyak memperkaya kelompok-kelompok pemilik modal yang sudah dominan.

Kebijakan hilirisasi yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi untuk meningkatkan nilai tambah dan konsumsi domestik CPO (Crude Palm Oil) ternyata belum menyentuh akar permasalahan. Hilirisasi lebih banyak dipahami sebagai upaya teknis untuk memproses bahan mentah menjadi produk jadi, namun tidak disertai dengan reformasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan, penguasaan aset, dan relasi kuasa dalam industri. Akibatnya, meskipun ada peningkatan kapasitas produksi di sektor hilir, alokasi pasokan dan harga tetap dikendalikan oleh konglomerat besar yang memiliki kendali penuh atas seluruh rantai pasok, mulai dari hulu (perkebunan) hingga hilir (pengolahan dan distribusi). Tanpa intervensi terhadap struktur kekuasaan dan pengaturan distribusi manfaat ekonomi, kebijakan hilirisasi akan tetap bersifat kosmetik dan gagal menjawab problem fundamental. Salah satu indikasi nyata dari dominasi kekuatan pasar atas logika sosial adalah tidak adanya regulasi yang mewajibkan produsen CPO untuk mengalokasikan sebagian produksinya bagi kebutuhan produksi minyak goreng domestik sebelum krisis terjadi (CNN, 2022). Ketidakhadiran kewajiban ini tidak sekadar kelalaian administratif, melainkan menunjukkan bagaimana logika pasar yang berorientasi pada profit dan efisiensi telah mengalahkan logika kebutuhan sosial masyarakat, yaitu ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok. Dalam kerangka ini, keputusan ekonomi tidak didasarkan pada prinsip keadilan sosial atau perlindungan terhadap konsumen, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh kalkulasi keuntungan jangka pendek.

Krisis ini dengan demikian mencerminkan kegagalan negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan publik. Negara tidak hadir secara aktif untuk mengatur dan membatasi dominasi pasar, tetapi justru cenderung membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa kontrol yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks oligarki, negara sering kali berperan sebagai fasilitator bagi kepentingan elite ekonomi daripada sebagai pelindung kepentingan rakyat. Untuk mengatasi problem ini secara menyeluruh, diperlukan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga struktural dan politis.

Reformasi regulasi harus disertai dengan upaya demokratisasi ekonomi, transparansi dalam tata kelola industri strategis, dan pembatasan pengaruh oligarki dalam proses pengambilan keputusan publik. Tanpa perubahan mendasar tersebut, kekayaan sumber daya seperti kelapa sawit akan terus menjadi sumber akumulasi kekayaan bagi segelintir pihak, sementara masyarakat luas tetap rentan terhadap krisis serupa di masa depan.

Dialektika Negara dan Pasar dalam Krisis

Dalam bingkai ekonomi-politik, penting bagi pemerintah untuk memahami bahwa setiap kebijakan baik di bidang ekonomi maupun politik selalu mengandung konsekuensi distribusi yang tidak merata. Artinya, tidak ada kebijakan yang sepenuhnya netral atau mampu memuaskan semua kelompok secara bersamaan. Dalam konteks negara demokratis sekalipun, realitas politik tetap memperlihatkan adanya kontestasi antar kelompok kepentingan yang masing-masing berusaha memaksimalkan keuntungan ekonomi dan politik dengan usaha seminimal mungkin (FISIP UI, 2022). Oleh karena itu, kebijakan publik senantiasa menjadi arena perebutan kepentingan, di mana kekuatan ekonomi dan politik saling mempengaruhi dalam menentukan arah dan isi dari kebijakan tersebut.

Krisis minyak goreng 2021-2022 menjadi salah satu contoh konkret dari ketegangan mendasar antara fungsi negara sebagai regulator yang wajib melindungi kepentingan rakyat dengan tekanan kuat dari kekuatan oligarki yang menguasai sektor-sektor strategis, seperti industri kelapa sawit. Negara seharusnya hadir sebagai aktor yang mampu menjamin keadilan distribusi, melindungi konsumen domestik, dan mengarahkan produksi nasional untuk mendukung kesejahteraan publik. Namun, dalam praktiknya, negara sering kali justru terjebak dalam logika pasar dan tunduk pada kekuatan modal besar yang mampu memengaruhi kebijakan, baik secara langsung melalui lobi politik maupun secara tidak langsung melalui tekanan ekonomi seperti ancaman relokasi produksi atau pengurangan pasokan domestik.

Dalam konteks inilah, peran oligarki menjadi sangat dominan. Oligarki bukan hanya menghasilkan ketimpangan distribusi kekayaan, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk kekerasan struktural yang tak kasat mata seperti kelangkaan barang pokok, inflasi harga, dan penurunan daya beli masyarakat. Eksploitasi sistematis terhadap sumber daya ekonomi, seperti kelapa sawit, menjadikan keuntungan dari industri tersebut terkonsentrasi pada segelintir korporasi, sementara masyarakat luas hanya menerima dampak negatif berupa kelangkaan dan harga yang melambung tinggi. Ini menunjukkan bahwa kendali atas sektor strategis bukan sekadar persoalan teknis ekonomi, tetapi juga persoalan politik kekuasaan siapa yang memiliki kontrol atas sumber daya, dialah yang menentukan arah kebijakan. Lebih dari itu, dominasi oligarki juga melemahkan kapasitas negara dalam menjalankan fungsi redistributifnya. Ketika elite ekonomi memiliki akses langsung maupun tidak langsung terhadap pengambil kebijakan, maka aspirasi publik yang lemah secara ekonomi dan politik sering kali terpinggirkan. Negara kehilangan otonomi dan kapasitasnya sebagai penjaga kepentingan bersama, dan justru bertransformasi menjadi pelayan kepentingan korporasi besar. Hal ini tidak hanya menciptakan krisis legitimasi terhadap institusi negara, tetapi juga memperkuat siklus ketimpangan sosial dan ekonomi yang sulit diputus.

Oleh karena itu, krisis minyak goreng bukan sekadar peristiwa kelangkaan komoditas, melainkan merupakan cermin dari persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi-politik Indonesia. Diperlukan upaya serius untuk mengembalikan peran negara sebagai pelindung kepentingan publik, yang mencakup reformasi kelembagaan, transparansi dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk mengawasi serta menekan akuntabilitas pemerintah dan pelaku usaha. Tanpa itu, relasi yang timpang antara

negara, pasar, dan masyarakat akan terus melahirkan krisis-krisis serupa yang semakin menegaskan dominasi oligarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Faktor – Faktor Penyebab Krisis

Fluktuasi Harga CPO Global

Salah satu pemicu utama dari krisis minyak goreng 2021-2022 di Indonesia adalah melonjaknya harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di pasar internasional. Sebagai komoditas global, harga CPO sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran dunia, termasuk kebijakan energi alternatif seperti biodiesel di negara maju, ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, serta gangguan rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Perubahan-perubahan ini menyebabkan lonjakan harga CPO secara signifikan dan dalam waktu yang relatif singkat. Harga minyak goreng domestik di Indonesia memiliki korelasi yang kuat terhadap pergerakan harga CPO global, menandakan betapa eratnya keterkaitan antara pasar domestik dan pasar internasional dalam konteks komoditas ini (Maolia, 2023).

Ketergantungan terhadap harga pasar global tanpa adanya proteksi nasional menjadikan Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal. Hal ini semakin diperparah oleh absennya instrumen kebijakan yang mampu menstabilkan harga di tingkat konsumen. Misalnya, tidak adanya skema buffer stock nasional untuk CPO atau minyak goreng, lemahnya pelaksanaan Domestic Market Obligation (DMO), serta tidak efektifnya subsidi langsung kepada konsumen atau produsen kecil. Dalam situasi seperti ini, konsumen domestik terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka terpaksa membeli minyak goreng dengan harga jauh di atas harga normal, bahkan terjadi antrean panjang dan aksi panic buying di berbagai daerah.

Ketika mekanisme pasar dibiarkan bekerja secara penuh tanpa intervensi negara yang memadai, maka krisis seperti ini sangat mudah berulang. Negara seharusnya memiliki peran sebagai stabilisator yang melindungi konsumen dari volatilitas harga global dengan merancang sistem distribusi dan kebijakan fiskal yang adil dan berpihak. Ketiadaan sistem semacam ini menunjukkan bahwa negara masih sangat bergantung pada logika pasar bebas, padahal kebutuhan akan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang semestinya dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Oleh karena itu, krisis ini menyoroti pentingnya reformasi struktural dalam tata kelola komoditas strategis agar keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai secara berkelanjutan.

Orientasi Ekspor yang Berlebihan

Produsen minyak goreng lebih memilih mengeksport produknya ke luar negeri dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar, sehingga stok untuk pasar domestik mengalami penurunan drastis bahkan hingga defisit (Wardhani, 2023). Pilihan ini dapat dipahami dalam kerangka insentif ekonomi yang ditawarkan oleh pasar global. Ketika harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional meningkat tajam, produsen cenderung mengarahkan pasokan ke luar negeri karena mampu menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan menjual di pasar domestik yang harganya cenderung dikendalikan.

Namun orientasi ekspor yang berlebihan ini justru menimbulkan dampak serius bagi ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng di dalam negeri. Masyarakat menghadapi kelangkaan pasokan, lonjakan harga, hingga munculnya fenomena panic buying dan penimbunan oleh pihak-pihak tertentu. Situasi ini

memperlihatkan bagaimana logika pasar yang berorientasi pada keuntungan semata dapat berbenturan langsung dengan kepentingan publik, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Kegagalan Tata Kelola

Krisis ini tidak semata disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan oleh kegagalan tata kelola dan dominasi kepentingan oligarki dalam sektor komoditas strategis. Masalah utama yang tampak bukanlah pada aspek produksi, melainkan pada bagaimana distribusi, regulasi, dan pengawasan dijalankan. Dalam konteks ini, lemahnya peran negara sebagai pengatur (regulator) telah menciptakan ruang yang lebar bagi aktor-aktor ekonomi besar untuk mengendalikan arah kebijakan sesuai dengan kepentingan akumulasi modal mereka. Hasilnya adalah kebijakan yang cenderung responsif terhadap tekanan pasar dan kelompok elite bisnis, alih-alih berpihak pada kepentingan publik.

Dampak Sosial Ekonomi

Krisis minyak goreng 2021-2022 menjadi titik kritis yang memperlihatkan rapuhnya fondasi perlindungan sosial dan tata kelola distribusi pangan pokok di Indonesia. Dampaknya sangat terasa pada tingkat rumah tangga, terutama kalangan menengah ke bawah yang pengeluarannya didominasi oleh kebutuhan konsumsi harian. Lonjakan harga minyak goreng dari sekitar Rp11.000 menjadi lebih dari Rp20.000 per liter bukanlah sekadar angka statistik, tetapi mewakili beban psikologis, sosial, dan ekonomi bagi jutaan keluarga. Bagi rumah tangga miskin, minyak goreng bukan hanya kebutuhan dapur, melainkan juga menjadi alat produksi, terutama bagi pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro. Ketika harga minyak goreng melonjak drastis, banyak pelaku usaha informal yang terpaksa mengurangi volume produksi, menaikkan harga jual, atau bahkan menghentikan usaha mereka (Yunizar, 2024). Kondisi ini turut memperparah pengangguran terselubung, menurunkan pendapatan harian, serta mengganggu sirkulasi ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada sektor informal dan makanan murah.

Selain itu ketimpangan akses terhadap minyak goreng selama masa krisis juga menjadi sorotan utama. Sementara sebagian besar masyarakat antre panjang di ritel dan pasar tradisional untuk memperoleh minyak goreng dengan harga subsidi atau bahkan tak kebagian sama sekali, korporasi besar justru tetap leluasa menyalurkan CPO ke pasar ekspor. Hal ini mencerminkan adanya dualisme sistem distribusi yang berpihak pada pemilik modal. Dalam sistem ekonomi politik yang sarat pengaruh oligarki, keputusan alokasi sumber daya bahkan untuk kebutuhan dasar seperti pangan seringkali lebih ditentukan oleh logika keuntungan dibandingkan prinsip keadilan sosial. Pemerintah tampak kurang memiliki instrumen pengendalian yang efektif, baik dari sisi regulasi harga, transparansi distribusi, maupun pengawasan terhadap penimbunan dan spekulasi pasar. Akibatnya, masyarakat miskin tidak hanya menjadi korban dari mekanisme pasar yang bebas, tetapi juga dari ketidakmampuan negara mengintervensi secara aktif untuk menjamin hak-hak dasar warganya.

Lebih jauh lagi, krisis ini memicu penurunan drastis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat mempertanyakan di mana peran pemerintah ketika harga meroket, minyak goreng menghilang dari pasaran, dan antrian panjang mewarnai pasar tradisional di berbagai daerah. Reaksi pemerintah yang cenderung lamban dan tidak konsisten seperti perubahan kebijakan ekspor-impor, pembatalan larangan ekspor, serta minimnya sanksi tegas terhadap pelaku penimbunan serta memperkuat persepsi bahwa negara lebih tunduk pada tekanan kelompok bisnis besar daripada memperjuangkan kebutuhan rakyat. Ini bukan semata soal tata kelola distribusi barang, tetapi menyangkut kredibilitas negara sebagai pelindung rakyat.

Dalam jangka panjang, ketidakmampuan mengelola krisis seperti ini dapat melemahkan legitimasi negara dan memperdalam jurang antara elite penguasa dan masyarakat biasa.

Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan Reaktif dan Kurang Transparan

Salah satu persoalan mendasar dalam penanganan krisis minyak goreng 2021-2022 adalah respons kebijakan pemerintah yang bersifat reaktif dan tidak terencana secara matang. Kebijakan seperti larangan ekspor CPO, penetapan harga eceran tertinggi (HET), serta program subsidi minyak goreng curah, diterapkan dalam waktu singkat tanpa kesiapan infrastruktur distribusi yang memadai maupun mekanisme pengawasan yang kuat. Akibatnya, kebijakan tersebut bukannya meredam gejolak pasar, tetapi justru menimbulkan distorsi baru, seperti kelangkaan di ritel modern, penimbunan oleh oknum distributor, hingga praktik jual beli di pasar gelap dengan harga jauh di atas HET. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi lintas lembaga dan tidak adanya rencana kontinjensi (contingency plan) dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas strategis. Solusi jangka panjang yang lebih strategis adalah dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan industri kelapa sawit, memperkuat pelibatan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan, serta memperjelas arah prioritas melalui pengaturan regulatif yang mengutamakan suplai pasar domestik (FISIP UI, 2022). Pemberian insentif untuk perdagangan dalam negeri juga dapat menjadi instrumen ekonomi yang penting agar pelaku industri tidak hanya berorientasi pada pasar ekspor.

Ketidakkonsistenan Regulasi

Selain kebijakan yang reaktif, krisis ini juga ditandai oleh ketidakkonsistenan regulasi pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mencatat bahwa sejak awal tahun 2022 hingga pertengahan tahun, terdapat beberapa kali perubahan kebijakan terkait harga, mekanisme distribusi, dan kebijakan ekspor CPO yang dikeluarkan dalam waktu berdekatan. Misalnya, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sempat diberlakukan namun kemudian dicabut, lalu diganti dengan larangan ekspor, yang juga kemudian dibatalkan dan diganti dengan sistem pengendalian berbasis kuota (PPBK DPR RI, 2022). Inkonsistensi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha, yang akhirnya memicu praktik spekulatif dan mendorong volatilitas harga di tingkat konsumen. Ketidakpastian kebijakan juga melemahkan kepercayaan publik terhadap efektivitas intervensi negara, serta membuka ruang bagi aktor-aktor pasar yang memiliki informasi dan akses lebih besar untuk memanfaatkan celah-celah dalam sistem regulasi demi keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, krisis minyak goreng tidak hanya menunjukkan kegagalan teknis dalam pengaturan pasokan dan harga, tetapi juga mengindikasikan lemahnya kapasitas negara dalam menciptakan sistem regulasi yang konsisten, responsif, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Perspektif Ekonomi Politik Kritis

Krisis minyak goreng 2021-2022 di Indonesia mengungkap relasi kuasa yang timpang antara kekuatan korporasi besar di sektor kelapa sawit dan posisi negara serta masyarakat sebagai pihak yang lebih lemah dalam rantai distribusi dan pengambilan kebijakan. Ketergantungan negara terhadap penerimaan ekspor komoditas, terutama Crude Palm Oil (CPO), menyebabkan adanya toleransi tinggi terhadap

dominasi korporasi dalam menentukan alokasi produksi, harga jual, hingga distribusi. Korporasi besar cenderung mengutamakan akumulasi profit dari pasar internasional yang menjanjikan harga lebih tinggi, sementara kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng sebagai bahan pokok justru diabaikan. Dalam kondisi demikian, negara gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai pelindung kepentingan publik. Akar dari persoalan ini bukan hanya terletak pada mekanisme pasar bebas, melainkan pada struktur kekuasaan ekonomi yang tidak seimbang, di mana pemilik modal besar memiliki akses istimewa terhadap pengambilan kebijakan dan regulasi.

Fenomena ini mencerminkan konflik kepentingan struktural yang lebih dalam, di mana logika akumulasi kapital kerap kali bertentangan dengan logika kebutuhan sosial. Negara, dalam banyak kasus, terseret dalam tarik-menarik kepentingan antara elit ekonomi dan aspirasi masyarakat. Akibatnya, kebijakan publik kerap tidak mampu menjawab krisis secara tepat waktu dan berpihak kepada kelompok yang paling terdampak. Dalam sistem ekonomi politik, tidak ada kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak secara optimal karena setiap aktor, baik dari sektor negara maupun swasta, akan senantiasa berupaya memaksimalkan keuntungannya dengan usaha seminimal mungkin. Dalam konteks ini, produsen minyak goreng bertindak secara rasional dalam kerangka pasar, namun absennya kontrol negara mengubah rasionalitas ekonomi tersebut menjadi bentuk eksploitasi terhadap konsumen domestik.

Oleh karena itu, peran negara tidak cukup hanya sebagai penengah atau fasilitator, melainkan sebagai aktor kunci dalam menetapkan arah pembangunan yang inklusif dan adil. Negara harus mampu menyusun kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap krisis sesaat, tetapi juga berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Peran negara yang lebih kuat diperlukan dalam membatasi kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi, misalnya melalui pembentukan regulasi wajib pasok domestik (Domestic Market Obligation/DMO) yang jelas dan tegas, pemberian insentif bagi pelaku usaha yang mendukung ketahanan pangan dalam negeri, serta penerapan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran distribusi atau penimbunan bahan pokok.

Lebih jauh lagi, negara perlu memperkuat kapasitas institusi pengawas, meningkatkan transparansi data produksi dan distribusi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan. Dalam jangka panjang, penyelesaian konflik kepentingan struktural seperti ini memerlukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola ekonomi politik Indonesia, di mana prinsip demokrasi ekonomi benar-benar diterapkan, bukan sekadar menjadi jargon dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dengan demikian, krisis minyak goreng dapat menjadi pelajaran penting bagi negara untuk merevitalisasi perannya, bukan hanya sebagai penjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar rakyat terhadap pangan, harga yang adil, dan akses terhadap sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama.

KESIMPULAN

Krisis minyak goreng yang terjadi pada 2021-2022 di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fluktuasi ekonomi atau gangguan pasokan bahan baku. Lebih dari itu, krisis ini mencerminkan persoalan struktural yang kompleks dalam ekonomi politik Indonesia. Melalui lensa teori oligarki Jeffrey A. Winters, krisis ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi di tangan segelintir korporasi besar mampu mendikte arah kebijakan publik, bahkan pada sektor yang menyangkut

kebutuhan dasar masyarakat. Kenaikan harga CPO global, orientasi ekspor yang berlebihan, serta lemahnya tata kelola dan regulasi menjadi kombinasi faktor yang menunjukkan betapa dominannya kepentingan akumulasi modal dibanding kepentingan kesejahteraan rakyat. Struktur pasar yang oligopolistik dalam industri kelapa sawit memberikan kekuatan besar bagi produsen untuk mengatur alokasi produksi dan distribusi. Regulasi negara yang tidak konsisten dan bersifat reaktif memperburuk krisis ini, menjadikan masyarakat khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai pihak yang paling terdampak. Beban ekonomi meningkat tajam, ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok makin dalam, dan kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam melindungi rakyat pun menurun. Hal ini diperparah oleh adanya konflik kepentingan struktural antara negara sebagai regulator dan elit ekonomi sebagai aktor dominan dalam sektor strategis.

Krisis ini memberikan pelajaran penting bahwa penyelesaian persoalan pangan pokok seperti minyak goreng tidak dapat dilakukan secara parsial dan jangka pendek. Negara perlu hadir secara lebih kuat dan konsisten dalam melakukan intervensi pasar, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk memastikan keadilan distribusi dan ketersediaan barang bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup reformasi tata kelola industri kelapa sawit, penataan ulang struktur kepemilikan dan distribusi, serta penguatan institusi publik agar tidak mudah terkooptasi oleh kekuatan oligarki. Dengan demikian, krisis minyak goreng merupakan cerminan dari ketidakseimbangan mendalam dalam relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Mengatasi krisis ini memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengobati gejalanya, tetapi juga menyentuh akar persoalan struktural yang telah lama dibiarkan. Reformasi kebijakan, penguatan kapasitas negara, dan pemihakan yang tegas terhadap kepentingan publik menjadi kunci penting dalam mencegah krisis serupa di masa depan serta membangun sistem ekonomi yang lebih adil, tangguh, dan berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2022). Krisis Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit, 22 Desember 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221222092857-92-890598/krisis-minyak-goreng-di-negeri-kaya-sawit>
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (2022). "Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik." *FISIP UI Press*, hlm. 1-15. <https://fisip.ui.ac.id/krisis-minyak-goreng-dari-sisi-ekonomi-politik/>
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (2022). "Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik." *FISIP UI Press*, hlm. 5-7. <https://fisip.ui.ac.id/krisis-minyak-goreng-dari-sisi-ekonomi-politik/>
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (2022). Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi Politik. *FISIP UI Press*, hlm. 1-15. <https://fisip.ui.ac.id/krisis-minyak-goreng-dari-sisi-ekonomi-politik/>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, No. 96, hlm. 35-57. DOI: <https://doi.org/10.1353/ind.2013.0023>
- Imeldalius, Imeldalius, et al. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzariâ€™™ ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 10.3: 2524-2531.

- Maolia, S. (2023). "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Goreng di Indonesia." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, Vol. 9, No. 2, hlm. 2117-2134. DOI: <https://doi.org/10.25157/ma.v9i2.15344>.
<https://jurnal.unigal.ac.id/mimbaragribisnis/article/view/15344>
- Maolia, S. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Harga Minyak Goreng di Indonesia. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, Vol. 9, No. 2, hlm. 2117-2134. DOI: <https://doi.org/10.25157/ma.v9i2.15344>.
<https://jurnal.unigal.ac.id/mimbaragribisnis/article/view/15344>
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2022). "Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No. 3/I/Puslit/Februari/2022, hlm. 13-18. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-3-I-P3DI-Februari-2022-191.pdf
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2022). Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No. 3/I/Puslit/Februari/2022, hlm. 13-18. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-3-I-P3DI-Februari-2022-191.pdf
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.
- Ulum, K. M., Khairunnisa, M., Suganda, R., Nimah, R., & Makraja, F. (2024). Indonesia Sustainable Funding: Comparative of Standar Screening Securities Crowdfunding and Capital Markets. *International Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-18
- Universitas Indonesia. (2022). FISIP UI Bedah Krisis Minyak Goreng dari Sisi Ekonomi-Politik.
<https://www.ui.ac.id/en/fsps-ui-discusses-the-cooking-oil-crisis-from-the-economic-political-side/>
- Wardhani, S. P., & Rahmahani, A. P. (2023). Pengaruh Kelangkaan Minyak Goreng Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dengan Upah Minimum Propinsi di Bekasi. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 20, April 2023.
- Winters, J. A. (2022, April 26). Esensi Oligarki adalah Pertahanan Kekayaan. *Berdikari Online*.
<https://www.berdikarionline.com/jeffrey-winters-esensi-oligarki-adalah-pertahanan-kekayaan/>
- Yunizar, E. (2024). Krisis Minyak Goreng dan Dampak pada Industri Kuliner di Indonesia. *Kumparan*, 13 Mei 2024. <https://kumparan.com/eva-yunizar/krisis-minyak-goreng-dan-dampak-pada-industri-kuliner-di-indonesia-22iioTfg8zr>